

EVALUASI KEBIJAKAN PEMBENTUKAN DESA SRI TANJUNG KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2011

Oleh
Lasaripudin
NIM. 170565201073
lasaripudin73@gmail.com

ABSTRAK

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa dalam pasal 2 ayat (3) menjelaskan pembentukan desa dapat berupa penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa diluar desa yang telah ada. Desa Sri Tanjung merupakan desa pemekaran dari Desa Tarempa Barat yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Desa Tarempa Selatan, Desa Tarempa Timur, Desa Pesisir Timur, Desa Sri Tanjung, Desa Tarempa Barat Daya, Desa Lidi, Desa Liuk, Desa Teluk Sunting, Desa Serat, Desa Air Putih, Desa Temburun, Desa Air Bini, Desa Teluk Bayur, Desa Matak, Desa Batu Ampar, Desa Payamaram, Desa Piasan, Desa Belibak, Desa Batu Berapit dan Desa Landak. Kebijakan pembentukan desa ini bertujuan untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas dibidang pemerintahan dan pembangunan serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Kepulauan Anambas. Tujuan penelitian untuk mengevaluasi kebijakan pembentukan Desa Sri Tanjung Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011 apakah berdampak terhadap percepatan dan pemerataan pembangunan, pemberdayaan ekonomi, rentang kendali pelayanan dan kualitas sumber daya manusia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan informan sebanyak 9 (sembilan) orang serta menggunakan teknik dan alat pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pembentukan Desa Sri Tanjung memberikan dampak positif yaitu pembangunan di Desa Sri Tanjung mulai merata, Pemerintahan Desa Sri Tanjung mulai meningkatkan perekonomian dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada didesa, rentang kendali pelayanan menjadi lebih dekat sehingga Pemerintah Desa bisa memberikan pelayanan yang lebih efektif dan kualitas sumber daya manusia di Desa Sri Tanjung mulai meningkat dikarenakan adanya dorongan dari Pemerintah Desa untuk mendapatkan pendidikan dari usia dini.

Kata Kunci : Evaluasi, Kebijakan, Pembentukan Desa

EVALUATION OF POLICY FOR THE ESTABLISHMENT OF THE SRI TANJUNG VILLAGE KEPULAUAN ANAMBAS REGENCY IN 2011

By
Lasaripudin
NIM. 170565201073
lasaripudin73@gmail.com

ABSTRACT

Government regulations the Republic of Indonesia number 72 of 2005 concerning village in article 2 paragraph (3) explains that the formation of a village can be in the form of merging several villages, or part of a village side by side, or the expansion of one village into two or more village, or the formation of villages outside the existing villages. Sri Tanjung Village is an expansion village from the Tarempa Barat Village which was formed based on the Anambas Islands Regency Regional Regulation Number 14 of 2011 concerning the Establishment of the Tarempa Selatan Village, Tarempa Timur Village, Pesisir Timur Village, Sri Tanjung Village, Tarempa Barat Daya Village, Lidi Village, Liuk Village, Teluk Sunting Village, Serat Village, Air Putih Village, Temburun Village, Air Bini Village, Teluk Bayur Village, Matak Village, Batu Ampar Village, Payamaram Village, Piasan Village, Belibak Village, Batu Berapit Village and Landak Village. This village formation policy aims to smooth the implementation of tasks in the field of government and development as well as to improve services to the community in the Anambas Islands Regency. The purpose of the study was to evaluate the policy of establishing the Sri Tanjung Village in Anambas Islands Regency in 2011 whether it had an impact on the acceleration and equity of development, economic empowerment, span of service control and the quality of human resources. The method used in this research is descriptive qualitative method with 9 (nine) informants and uses data collection techniques and tools in the form of observation, interviews and documentation. The results of the study show that the policy of establishing the Sri Tanjung Village has a positive impact, namely development in the Sri Tanjung Village is starting to spread evenly, the Sri Tanjung Village government is starting to improve the economy by utilizing the potential of natural resources in the village, the range of service control becomes closer so that the village government can provide services more effective and the quality of human resources in the Village of Sri Tanjung began to improve due to the encouragement of the village government to get education from an early age.

Keywords: *Evaluations, Policy, Village Formations*